

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, partisipasi tenaga kerja wanita (TPAKW), dan pendidikan (rata-rata lama sekolah) terhadap ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) pada tiga kelompok wilayah di kawasan Tapal Kuda Jawa Timur yang mewakili tingkat ketimpangan tertinggi (Kabupaten Lumajang), sedang (Kabupaten Bondowoso), dan terendah (Kota Probolinggo) selama periode 2016–2025, menggunakan regresi linier berganda berbasis data time series pada masing-masing wilayah. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab IV, berikut disajikan kesimpulan penelitian yang disusun secara berurutan untuk menjawab keempat tujuan penelitian sebagaimana dirumuskan pada Bab I, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi, partisipasi tenaga kerja wanita, dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Lumajang sebagai wilayah dengan tingkat ketimpangan tertinggi di kawasan Tapal Kuda. Artinya, perbaikan pada ketiga faktor tersebut belum mampu memperbaiki maupun memperburuk distribusi pendapatan secara nyata di wilayah ini. Kondisi ini sejalan dengan struktur perekonomian Kabupaten Lumajang yang masih bertumpu pada sektor pertanian dan usaha informal, sehingga hasil pertumbuhan ekonomi cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang telah menguasai lahan dan modal usaha, sementara sebagian

tenaga kerja lain, termasuk perempuan dan lulusan pendidikan menengah-tinggi, belum sepenuhnya terserap ke sektor formal yang lebih produktif. Akibatnya, ketimpangan pendapatan di wilayah ini tetap tinggi meskipun ketiga faktor tersebut terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

2. Partisipasi tenaga kerja wanita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bondowoso sebagai wilayah dengan tingkat ketimpangan sedang, artinya semakin banyak perempuan yang aktif bekerja, ketimpangan pendapatan di wilayah ini justru semakin menurun. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masuknya perempuan ke dalam angkatan kerja, baik di sektor pertanian, perdagangan, maupun usaha mikro kecil dan menengah, menambah sumber pendapatan rumah tangga yang sebelumnya hanya bergantung pada satu pencari nafkah, sehingga pendapatan antarrumah tangga menjadi lebih merata. Belum signifikannya pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendidikan mengindikasikan bahwa perbaikan pada kedua faktor tersebut memang mendorong kesejahteraan secara umum, tetapi belum tentu menjangkau kelompok berpendapatan rendah secara proporsional.

3. Pertumbuhan ekonomi, partisipasi tenaga kerja wanita, dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Probolinggo sebagai wilayah dengan tingkat ketimpangan terendah di kawasan Tapal Kuda. Artinya, distribusi pendapatan yang relatif merata di kota ini tidak banyak dijelaskan oleh naik turunnya ketiga faktor tersebut. Kondisi ini masuk akal mengingat Kota Probolinggo merupakan wilayah perkotaan dengan struktur ekonomi yang lebih didominasi sektor perdagangan dan jasa

berskala kecil hingga menengah, sehingga kesempatan kerja relatif lebih merata dan tidak terlalu bergantung pada tingkat pendidikan formal maupun keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja. Ketimpangan pendapatan yang sudah rendah di wilayah ini kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, seperti pemerataan upah dan besarnya sektor informal berskala kecil yang menyerap tenaga kerja secara merata, dibandingkan oleh ketiga variabel yang diteliti.

4. Perbandingan antara ketiga kelompok wilayah menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi, partisipasi tenaga kerja wanita, dan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan tidak seragam, melainkan sangat bergantung pada karakteristik struktural masing-masing wilayah. Pertumbuhan ekonomi secara konsisten tidak berpengaruh signifikan pada ketiga kelompok wilayah, yang berarti besarnya pertumbuhan ekonomi saja belum cukup untuk menjamin perbaikan distribusi pendapatan apabila tidak disertai pemerataan akses terhadap lapangan kerja dan sumber daya produktif. Partisipasi tenaga kerja wanita justru menjadi faktor yang paling menentukan perbedaan pengaruh antarwilayah, karena hanya berpengaruh signifikan di Kabupaten Bondowoso yang berketimpangan sedang, wilayah yang diduga masih memiliki ruang cukup besar bagi perempuan untuk masuk ke pasar kerja sehingga dampaknya terhadap pemerataan pendapatan terasa nyata, berbeda dengan Kabupaten Lumajang yang keterbatasan strukturalnya lebih dominan, maupun Kota Probolinggo yang ketimpangannya sudah relatif rendah sehingga ruang perbaikan lebih lanjut menjadi terbatas. Sementara itu, tingkat pendidikan belum terbukti berpengaruh signifikan pada ketiga kelompok wilayah, yang

mengindikasikan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah belum secara otomatis diikuti oleh perbaikan kualitas maupun penyerapan tenaga kerja ke sektor-sektor yang lebih produktif dan berpenghasilan tinggi. Pola ini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan ketimpangan pendapatan di wilayah Tapal Kuda perlu dirancang secara kontekstual sesuai karakteristik masing-masing daerah, bukan diberlakukan secara seragam untuk seluruh wilayah.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut beberapa saran yang dapat diajukan kepada pihak-pihak terkait:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang: mengingat ketiga variabel belum terbukti signifikan, disarankan agar Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan setempat menjalankan pendataan rumah tangga berpendapatan rendah di sektor pertanian dan informal, sebagai dasar penargetan program bantuan produktif seperti sertifikasi lahan dan akses KUR bagi petani penggarap, dengan target penurunan proporsi rumah tangga miskin ekstrem sesuai indikator RPJMD yang berjalan

2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso (kelompok ketimpangan sedang), mengingat partisipasi tenaga kerja wanita terbukti berpengaruh signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan, perlu diperluas kesempatan kerja formal bagi perempuan melalui pelatihan keterampilan berbasis gender, pengembangan pusat pelatihan kerja perempuan,

dan kemudahan akses permodalan bagi usaha mikro yang dijalankan perempuan.

3. Bagi pemerintah daerah Kota Probolinggo (kelompok ketimpangan rendah), karena ketiga variabel penelitian belum terbukti berpengaruh signifikan, perlu dilakukan eksplorasi terhadap faktor kelembagaan dan struktur pasar tenaga kerja formal-informal yang kemungkinan lebih dominan, serta menjaga keberlanjutan tingkat pemerataan pendapatan yang sudah relatif baik melalui kebijakan afirmatif yang berkesinambungan.

4. Bagi pemerintah daerah se-Tapal Kuda disarankan penguatan program UMKM berbasis sektor unggulan tiap daerah (misalnya kopi di Bondowoso, perikanan di Probolinggo, agrowisata di Lumajang) melalui skema pendampingan dan akses pasar digital, dikoordinasikan lintas kabupaten/kota melalui forum kerja sama regional Tapal Kuda, dengan indikator peningkatan jumlah UMKM naik kelas per tahun

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan jumlah observasi penelitian, misalnya dengan menggunakan pendekatan regresi data panel gabungan (Fixed Effect Model) pada seluruh kabupaten/kota di wilayah Tapal Kuda agar hasil estimasi lebih robust dibandingkan regresi time series terpisah dengan jumlah observasi yang terbatas pada masing-masing wilayah. Selain itu, penambahan variabel lain seperti tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah untuk program sosial, dan aksesibilitas infrastruktur, serta perpanjangan periode

penelitian, diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.